

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) OLEH DINAS SOSIAL DI KABUPATEN JAYAPURA

Sisilia Condonova Duran Lamaau
NPP. 31.1062

Program Studi Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat
Fakultas Politik Pemerintahan
email : _____

Pembimbing Skripsi: Ir. Tjut Syiariah, MM

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The Family Hope Program (PKH) is a conditional social assistance program in Indonesia aimed at improving the welfare of poor families. Despite its benefits, several issues persist, such as inaccurate recipient data and multiple recipients, delayed distribution of aid, limited access, misallocation of aid, insufficient education and mentoring, inadequate monitoring and evaluation, and poor infrastructure. These challenges indicate that while PKH has good intentions, its implementation faces various obstacles that require ongoing attention and improvement.* **Objective:** *This research aims to analyze the effectiveness of empowering poor communities through the Family Hope Program (PKH) by the Social Service in Jayapura Regency, utilizing Najiyati's empowerment theory. According to Najiyati's theory, community empowerment should involve individuals and groups, strengthen local institutions, and increase access to resources and policies.* **Method:** *A qualitative approach with a descriptive research design was used. Data and information were collected through interviews, observations, and documentation. The collected data were analyzed using data reduction techniques, data presentation, and decision-making/verification.* **Results/Findings:** *The research found that the Family Hope Program (PKH) in Jayapura Regency has contributed to empowering poor communities, particularly by increasing economic capacity and access to education and health services. Beneficiaries reported an increase in family income and welfare after receiving PKH assistance. Additionally, the program has strengthened local institutions. However, the study also identified several obstacles in implementing PKH, such as limited access to information and constraints related to local customary culture.* **Conclusion:** *The Jayapura Regency government should improve infrastructure by enhancing internet access, improving roads, and expanding communication networks. Additionally, methods that align with local culture should be developed to promote the Family Hope Program. Utilizing traditional and cultural strengths can help inform and engage the community in empowerment programs through PKH. Thus, PKH is an effective instrument for empowering poor communities in Jayapura Regency, aligning with Najiyati's four principles of empowerment. Continuous efforts are needed to overcome existing obstacles for the program to achieve optimal empowerment goals.*

Keywords: *Community Empowerment, Poverty, Family Hope Program, Welfare*

ABSTRAK

Latar Belakang (GAP): Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Meskipun program ini telah memberikan banyak manfaat, terdapat beberapa fenomena permasalahan seperti ketidakakuratan data penerima dan penerima ganda, keterlambatan distribusi bantuan, keterbatasan akses, penggunaan bantuan yang tidak tepat sasaran, kurangnya edukasi dan pendampingan, serta pengawasan dan evaluasi yang tidak menyeluruh. Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun PKH memiliki tujuan yang baik, implementasinya menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian dan perbaikan terus-menerus. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Dinas Sosial di Kabupaten Jayapura, dengan menggunakan teori pemberdayaan dari Najiyyati. Teori Najiyyati mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat harus melibatkan individu dan kelompok, penguatan kelembagaan lokal, serta peningkatan akses terhadap sumber daya dan kebijakan. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data serta informasi dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang sudah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan/verifikasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian, PKH di Kabupaten Jayapura telah memberikan kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat miskin, terutama dalam peningkatan kapasitas ekonomi dan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Penerima manfaat melaporkan adanya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga setelah menerima bantuan PKH. Selain itu, program ini juga berhasil memperkuat kelembagaan lokal. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan PKH, seperti keterbatasan akses informasi dan hambatan budaya adat lokal. **Kesimpulan:** Disarankan agar pemerintah Kabupaten Jayapura memperbaiki infrastruktur yang kurang memadai dengan meningkatkan akses internet, memperbaiki jalan, dan memperluas jaringan komunikasi. Selain itu, metode yang sesuai dengan budaya lokal perlu dikembangkan untuk mempromosikan PKH, memanfaatkan kekuatan tradisi dan budaya untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya program pemberdayaan ini. Dengan demikian, PKH merupakan instrumen yang efektif dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Jayapura, sesuai dengan empat prinsip pemberdayaan menurut Najiyyati. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi kendala yang ada agar program ini dapat mencapai tujuan pemberdayaan yang lebih optimal.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Kemiskinan, Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu dari fungsi pemerintahan. Adapun fungsi pemerintahan dibagi menjadi empat bagian, yaitu pelayanan, pengaturan, pemberdayaan, dan pembangunan. Proses pemberdayaan masyarakat melibatkan pembentukan dan pematangan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat lokal agar mampu mengatasi pesatnya perkembangan globalisasi.

Indonesia menjadi sebuah negara berkembang yang masih dihadapkan dengan berbagai masalah sosial. Salah satu masalah sosial tersebut adalah masalah kemiskinan yang harus ditangani sehingga penting bagi pemerintah Indonesia agar memperhatikan akar penyebab kemiskinan sebagai isu yang sangat krusial. Kemiskinan adalah masalah multidimensi yang ditandai oleh rendahnya kualitas hidup rata-rata penduduk, pendidikan, perawatan kesehatan, gizi anak-anak, dan ketersediaan air minum yang memadai.

Kemiskinan merupakan penghalang untuk kemajuan dan ditandai dengan banyak kekurangan, keterbatasan, dan ketidakmampuan. Misalnya, tidak ada peluang usaha dan kesempatan kerja yang cukup, ketidakmampuan untuk mendapatkan pendidikan, ketidakmampuan untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai dan kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang dan pangan (Lestari, 2008). Keterbatasan serta ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya biasanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Terpenuhinya hak-hak individu, termasuk hak asasi manusia, hak perlindungan hukum, dan hak untuk mendapatkan kesejahteraan umum. Hal ini merupakan bukti keberhasilan suatu negara karena masih banyak ditemukan kasus pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran perlindungan hukum, dan kemiskinan yang terus meningkat, masyarakat Indonesia sangat membutuhkan pemenuhan hak-hak di atas. Kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi sehingga perlu adanya perhatian khusus dari pihak pemerintah agar dapat menurunkan angka kemiskinan di Indonesia tercatat pada sebesar 9,57%, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk masih menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan. Hal ini memerlukan upaya lebih lanjut untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan akses terhadap kesempatan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat. Persentase tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kemiskinan terendah keempat di Asia Tenggara. Posisi Indonesia di atas Thailand dengan tingkat kemiskinan sebesar 6,3% pada 2021. Kemudian, Malaysia dan Vietnam memiliki tingkat kemiskinan masing-masing sebesar 6,2% dan 6,1%. Maka dari itu, pemerintah diharapkan mampu untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya (Rizaty, 2023).

Salah satu wilayah di Indonesia dengan angka kemiskinan yang tinggi yaitu Provinsi Papua. Berdasarkan data dari BPS menyebutkan bahwa saat ini Papua berada pada peringkat ke pertama provinsi termiskin di Indonesia. Angka kemiskinan di Bumi Cendrawasih mencapai 26,03%.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota di Provinsi Papua Tahun 2019 – Tahun 2021

NO	Wilayah	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (persen)		
		2019	2020	2021
1	Biak Numfor	25,50	24,57	24,45
2	Jayapura	13,13	12,44	12,13
3	Keerom	16,83	16,32	16,00
4	Kepulauan Yapen	27,13	26,30	26,09
5	Mamberamo Raya	29,13	28,38	28,78
6	Sarmi	14,41	13,87	13,84
7	Supiori	38,79	36,91	37,91

8	Waropen	30,95	29,54	29,85
9	Kota Jayapura	34,42	33,80	34,79
	Papua	230,29	222,13	223,84

Sumber : BPS Provinsi Papua (2019-2021)

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jayapura masih menyentuh angka 12,13% di tahun 2021 sedangkan di tahun 2019 jumlah penduduk miskin berada pada 13,13%. Pada rentang 3 tahun dari 2019 sampai 2021 penurunan jumlah kemiskinan hanya sekitar 1% maka belum bisa dikatakan maksimal dalam mensejahterakan dan melindungi rakyatnya.

Kementerian Sosial sebagai pelaksana tugas pemerintahan yang memiliki salah satu fungsi yaitu mensejahterakan rakyat dan melakukan beberapa program yang diharapkan mampu untuk menjawab tantangan pemerintah dalam menangani kemiskinan yang ada di Indonesia. Kementerian Sosial menyatakan beberapa program Kementerian Sosial dalam memberantas kemiskinan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Sosial Ekonomi Keluarga (PSEK).

Salah satu program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat yang disusun untuk memberantas kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program bantuan sosial yang dikelola oleh pemerintah Indonesia. PKH bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Program ini telah berlangsung selama beberapa tahun dan memiliki dampak yang signifikan di seluruh wilayah, termasuk di Kabupaten Jayapura, Papua.

Bantuan sosial yang dilaksanakan di Kabupaten Jayapura melalui Dinas Sosial dalam rangka untuk pemberdayaan masyarakat salah satunya dengan Program Keluarga Harapan (PKH), dengan ini pemerintah kabupaten Jayapura melalui Dinas Sosial mendistribusikan bantuan sosial berupa bangunan warung kecil dan sembako berupa beras pada keluarga penerima PKH di 19 distrik yang ada di kabupaten Jayapura sebanyak 5.184 keluarga, kemudian keluarga penerima manfaat dari program BPNT sebanyak 7.204 keluarga di 19 distrik yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya, BST sebanyak 3.303 keluarga di 11 distrik yang ada di kabupaten tersebut. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan bantuan sosial ini masih didapatkan berbagai masalah yang ada. Maka dari itu, dinas sosial masih memiliki tugas yang harus diselesaikan dalam pendistribusian bantuan sosial (Maharani, 2020).

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Dinas Sosial di Kabupaten Jayapura”**.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Pertama, meskipun Program Keluarga Harapan (PKH) telah diterapkan selama beberapa tahun dan diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Jayapura, data menunjukkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan masih belum signifikan. Dalam rentang waktu tiga tahun dari 2019 hingga 2021, penurunan angka kemiskinan hanya sekitar 1%, yang menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan secara

menyeluruh. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi dan implementasi program, serta faktor-faktor yang mungkin menghambat keberhasilan program tersebut.

Kedua, meskipun bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan BST telah didistribusikan kepada ribuan keluarga di Kabupaten Jayapura, masih terdapat berbagai masalah dalam pelaksanaan distribusi bantuan sosial. Misalnya, terdapat kekurangan dalam monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kurangnya koordinasi antar instansi terkait juga dapat menghambat kelancaran pelaksanaan program pemberdayaan ini, yang pada akhirnya berpotensi mengurangi efektivitas program.

Ketiga, kesenjangan antara tujuan program pemberdayaan masyarakat dan hasil yang dicapai menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam memberdayakan masyarakat lokal di Kabupaten Jayapura. Keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta kurangnya kesempatan ekonomi yang memadai, mengindikasikan bahwa bantuan sosial saja tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan secara komprehensif. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik yang mencakup peningkatan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, dan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar untuk benar-benar mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Jayapura.

1.3 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu terkait keterwakilan perempuan dalam politik:

Penelitian terdahulu mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilakukan oleh berbagai peneliti dengan fokus yang berbeda. Muhammad Luthfi (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Efektivitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah" bertujuan untuk mengetahui perencanaan dan efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan PKH sudah berjalan dengan baik, ditandai dengan kelancaran setiap tahapan proses pelaksanaannya.

Mohd Iqbal Abdul Muin dan Siti Abidah Lubis (2020) dalam penelitian mereka yang berjudul "Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi" bertujuan untuk mengetahui bentuk kegiatan Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat melalui PKH serta hambatan dan solusi dalam pelaksanaannya. Dengan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa kehadiran dan peran Dinas Sosial melalui PKH di Desa Sidiangkat berjalan sesuai dengan tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Ema Fitri Lubis dan Evi Zubaidah (2020) dalam penelitian mereka yang berjudul "Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru" bertujuan untuk mengetahui efektivitas PKH dalam penanggulangan kemiskinan serta faktor penghambat yang ditemui. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan

menyimpulkan bahwa program PKH yang dilaksanakan sudah sesuai dengan tujuan program, terlihat dari hasil jawaban responden yang mengkategorikan efektivitas program ini sebagai efektif, cukup efektif, dan kurang efektif.

Faisal K. M. dan Jumroh J. (2019) dalam penelitian berjudul "Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Studi tentang Program Keluarga Harapan Di Kota Palembang)" mendeskripsikan dan menganalisis faktor penyebab belum efektifnya implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin melalui PKH. Dengan metode kualitatif dan desain deskriptif analitik, penelitian ini menemukan bahwa belum efektifnya implementasi kebijakan ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan masyarakat miskin dalam mengelola potensi sumber daya, struktur organisasi dan norma-norma birokrasi yang tidak terkait dengan kelembagaan masyarakat, serta belum efektifnya komunikasi dan hubungan antara aktor dengan elit Kecamatan, Kelurahan, stakeholders, dan opinion leader.

Saharuddin S. dan Syarifuddin S. (2022) dalam penelitian mereka yang berjudul "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin dengan Kualitas Pendamping dan Kualitas Program Keluarga Harapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Makassar" bertujuan untuk mengetahui kualitas PKH dalam pemberdayaan keluarga penerima manfaat serta faktor yang menyebabkan kualitas pendamping PKH belum berjalan efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menemukan bahwa kualitas PKH mampu mewujudkan pemberdayaan keluarga penerima manfaat melalui bantuan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas SDM pendamping sosial. Namun, kualitas pendamping sosial PKH masih belum berjalan efektif dalam melakukan pemberdayaan keluarga penerima manfaat.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) telah berhasil memberikan dampak positif dalam berbagai aspek kesejahteraan sosial, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, terutama terkait dengan efektivitas pendampingan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Kesimpulan-kesimpulan dari penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan PKH dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Pernyataan kebaruan ilmiah dalam penelitian tentang "Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Dinas Sosial di Kabupaten Jayapura" terletak pada pendekatan holistik yang digunakan untuk mengukur efektivitas program ini di wilayah yang memiliki karakteristik demografis dan geografis yang unik. Kabupaten Jayapura, dengan keanekaragaman budayanya serta tantangan geografis yang kompleks, menawarkan konteks yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Penelitian ini akan menggabungkan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana PKH diimplementasikan, tantangan yang dihadapi, serta dampak nyata dari program ini terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di wilayah tersebut.

Kebaruan lain dari penelitian ini adalah fokus pada evaluasi peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin melalui PKH dengan pendekatan partisipatif.

Penelitian ini akan menggali bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan PKH. Selain itu, penelitian ini akan meneliti faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan program, termasuk kualifikasi dan peran pendamping sosial, serta kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan komunitas lokal.

Akhirnya, penelitian ini akan memberikan rekomendasi yang spesifik dan aplikatif untuk peningkatan implementasi PKH di Kabupaten Jayapura, dengan mempertimbangkan karakteristik lokal dan kebutuhan khusus masyarakat setempat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kebijakan publik dalam perbaikan dan pengembangan program pemberdayaan masyarakat miskin di daerah-daerah lain dengan kondisi serupa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Jayapura, tetapi juga pada pengembangan strategi pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

1.5 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Jayapura, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan tersebut, serta mengeksplorasi dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan PKH di wilayah tersebut.

II. METODE

Pendekatan yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2015:3) menyebutkan bahwa metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mengandung makna secara mendalam. Dalam penelitian kualitatif, penekanan utamanya adalah pada pemahaman dan interpretasi atas makna yang terkandung di dalam data, bukan pada generalisasi atau generalisasi teori. Hal ini karena data yang dihasilkan dalam penelitian kualitatif umumnya bersifat deskriptif dan tergantung pada konteksnya, sehingga kesimpulan yang diambil lebih bersifat kontekstual. Oleh karena itu, penelitian kualitatif lebih memperhatikan makna dan interpretasi data dari perspektif partisipan atau subjek penelitian.

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk mengetahui serta mendapatkan data yang sesuai dengan kondisi yang ada atau disebut real data. Sujarweni (2019:11) menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mengidentifikasi nilai-nilai dari masing-masing variabel, baik yang bersifat independen ataupun lebih dari satu, tanpa membuat hubungan atau perbandingan dengan variabel lainnya.

Narasumber yang akan berperan dalam penelitian ini meliputi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Jayapura, dan Tim Pendamping Lapangan. Mereka merupakan orang yang memiliki pemahaman yang relevan yang terkait dengan permasalahan dan informasi yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, masyarakat yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat bantuan Program

Keluarga Harapan juga akan menjadi informan, karena mereka secara langsung merasakan manfaat dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dinas Sosial Kabupaten Jayapura

Pemberdayaan Masyarakat merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, wawasan, keahlian, dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat guna menghadapi tantangan, mengoptimalkan potensi, serta meningkatkan tingkat kesejahteraan dan keterlibatan dalam proses pembangunan. Pemberdayaan masyarakat merujuk pada apa yang dipersiapkan oleh pemerintah dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi warga negaranya yang miskin. Model yang dilakukan adalah dengan memberikan bantuan sosial yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan memangkas kemiskinan secara langsung lewat penyediaan pelayanan sosial dan pemberian uang dan barang.

Salah satu bantuan sosial yang ditujukan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat adalah bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dilaksanakan di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Program keluarga harapan adalah sebuah program bantuan sosial yang terdiri dari tiga komponen penerima yaitu, komponen pendidikan, komponen kesehatan, dan komponen kesejahteraan sosial. Melalui program ini, penerima mendapatkan dukungan dalam meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan serta fasilitas dan program kesejahteraan sosial guna memperbaiki kondisi kehidupan mereka.

1. Prinsip Kesetaraan

Prinsip kesetaraan menekankan pada pentingnya menciptakan lingkungan yang adil dan setara bagi masyarakat dalam upaya pemberdayaan. Prinsip ini mengacu pada keadilan dan kesetaraan akses terhadap sumber daya, peluang, dan hak yang dimiliki oleh masyarakat.

2. Prinsip Partisipasi

Prinsip partisipasi dalam teori pemberdayaan masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif dan nyata dari masyarakat dalam proses pemberdayaan. Partisipasi ini tidak hanya mencakup keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program, tetapi juga dalam pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

3. Prinsip Kemandirian

Prinsip kemandirian adalah kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk menjadi mandiri dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Masyarakat diharapkan mampu memimpin dan menjalankan proses pemberdayaan secara mandiri dengan dukungan dan fasilitasi dari luar. Prinsip ini mendorong masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam menentukan kebijakan dan mempengaruhi perubahan lingkungan mereka.

4. Prinsip Berkelanjutan

Prinsip berkelanjutan menekankan pentingnya menjalankan program pemberdayaan masyarakat dengan fokus pada pembangunan yang berkelanjutan. Upaya harus dilakukan

untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan agar program pemberdayaan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan serta kualitas hidup masyarakat.

3.2 Faktor penghambat pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Jayapura

Program Keluarga Harapan (PKH) diatur dalam Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019. Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala yang membuat beberapa penyaluran bantuan tidak efektif dan efisien. Peneliti menemukan beberapa masalah dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui program PKH yang bisa menghambat proses pemberdayaan. Oleh karena itu, dilakukan identifikasi faktor penghambat pemberdayaan masyarakat miskin dalam program PKH. Berikut faktor penghambat pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Jayapura dalam program PKH, (Maharani, 2020) yaitu:

1. Keterbatasan Akses Informasi

Keterbatasan akses informasi ini berkaitan dengan rendahnya keterjangkauan masyarakat terhadap informasi kesejahteraan sosial dari pemerintah, informasi ini berkaitan dengan bantuan sosial, pelatihan, sosialisasi dan informasi kesejahteraan sosial lainnya. Sementara masyarakat ini sangat memerlukan informasi tersebut, namun akibat dari ketidakterjangkauan akses yang dialami masyarakat dan petugas membuat pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Jayapura jadi terhambat. Selain itu, masalah yang sering dihadapi dalam program ini adalah kurangnya akses informasi yang memadai kepada masyarakat.

2. Kendala Budaya Adat Lokal

Program PKH merupakan program bantuan sosial yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dalam mensejahterahkan masyarakat. Masyarakat di Kabupaten Jayapura pada umumnya masih sangat melekat dengan budaya tradisional setempat yang sangat sulit untuk dikurangi.

3.3 Upaya Dinas Sosial Kabupaten Jayapura dalam mengatasi hambatan pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Jayapura

Berdasarkan dari faktor penghambat pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Jayapura, menurut Dinas Sosial perlu adanya upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berikut upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut:

1. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterbatasan akses informasi

Dalam rangka untuk mengatasi hambatan keterbatasan akses informasi, berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu: Peningkatan Komunikasi dan Sosialisasi Program PKH, Memanfaatkan Teknologi Informasi, Menggandeng Komunitas Lokal, Peningkatan Infrastruktur.

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala budaya adat lokal

Dalam rangka untuk mengatasi hambatan kendala budaya adat lokal, berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu: Pendidikan dan Pemahaman, Alternatif Pembiayaan, Pendekatan Partisipatif, dan Pembinaan Budaya.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Jayapura berjalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan, partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Muhammad Luthfi (2019) yang menyatakan bahwa PKH efektif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Desa Margajaya. Luthfi menemukan bahwa pelaksanaan PKH berjalan lancar di setiap tahapan, yang menunjukkan kesamaan dalam efektivitas program di berbagai daerah. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat yang unik di Kabupaten Jayapura, seperti keterbatasan akses informasi dan kendala budaya adat lokal, yang tidak terlalu ditekankan dalam penelitian Luthfi.

Perbandingan dengan penelitian Mohd Iqbal Abdul Muin dan Siti Abidah Lubis (2020) yang meneliti PKH di Desa Sidiangkat, Kabupaten Dairi, juga menunjukkan hasil yang relevan. Mereka menemukan bahwa Dinas Sosial berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, penelitian mereka tidak mendalami hambatan budaya adat lokal seperti yang ditemukan di Kabupaten Jayapura. Kendala budaya adat lokal ini menghambat efektivitas program PKH, dan upaya untuk mengatasi hambatan ini, seperti pendekatan partisipatif dan pendidikan, menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yang memberikan kontribusi tambahan terhadap literatur pemberdayaan masyarakat melalui PKH.

Selain itu, penelitian Ema Fitri Lubis dan Evi Zubaidah (2020) tentang efektivitas PKH di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, juga mengkonfirmasi bahwa PKH telah berhasil dalam penanggulangan kemiskinan. Namun, mereka mencatat efektivitas program bervariasi di antara responden. Penelitian ini memperluas diskusi tersebut dengan menunjukkan bahwa di Kabupaten Jayapura, masalah utama adalah keterbatasan akses informasi dan kendala budaya, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Upaya seperti peningkatan komunikasi dan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi solusi yang disarankan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, menambah dimensi baru dalam upaya pemberdayaan melalui PKH.

3.5 Diskusi Temuan Menarik

Penelitian ini menemukan bahwa salah satu faktor penghambat utama dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Jayapura adalah keterbatasan akses informasi yang memadai dan kendala budaya adat lokal. Keterbatasan akses informasi ini menghalangi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan tentang berbagai layanan dan bantuan sosial yang tersedia, sehingga mengurangi efektivitas program. Selain itu, kendala budaya adat lokal yang kuat menyebabkan resistensi terhadap perubahan dan inovasi yang dibawa oleh program PKH. Temuan ini menarik karena menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih holistik dan sensitif terhadap konteks lokal dalam pelaksanaan program pemberdayaan, yang

mencakup strategi untuk meningkatkan komunikasi, memanfaatkan teknologi informasi, serta melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Jayapura menunjukkan bahwa program ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai sasaran yang tepat. Penelitian mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian dalam penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi bantuan. Untuk memperbaiki hal ini, penting untuk memperbaiki proses seleksi KPM agar lebih adil dan merata. Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program juga perlu ditingkatkan guna memastikan dampak positif yang lebih besar, termasuk peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat serta kesadaran akan pola makan sehat dan usaha mandiri.

Penelitian juga menilai penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam program PKH. Prinsip kesetaraan telah dilaksanakan dengan baik, dengan adanya keadilan dalam penyaluran bantuan. Prinsip partisipasi juga telah menunjukkan hasil positif, dengan keterlibatan masyarakat yang aktif dalam berbagai tahap program. Prinsip kemandirian juga terlihat dari peningkatan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri melalui pelatihan dan pendidikan. Prinsip berkelanjutan ditekankan dalam upaya menjaga keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan agar program dapat berjalan secara berkelanjutan.

Namun, beberapa faktor penghambat ditemukan dalam pelaksanaan program PKH, yaitu keterbatasan akses informasi dan kendala budaya adat lokal. Keterbatasan informasi menghambat masyarakat dalam mengakses bantuan, sementara kendala budaya menyebabkan prioritas masyarakat sering kali bertentangan dengan tujuan program. Untuk mengatasi hambatan ini, upaya seperti peningkatan sosialisasi, pendidikan, dan pendekatan partisipatif diusulkan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program PKH dapat lebih efektif dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Jayapura.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan penelitian ini mencakup beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini terbatas pada wilayah Kabupaten Jayapura, sehingga hasil dan temuan mungkin tidak sepenuhnya representatif untuk daerah lain dengan kondisi sosial-ekonomi yang berbeda. Kedua, keterbatasan akses informasi dan keterbatasan waktu yang dialami peneliti mengakibatkan data yang dikumpulkan tidak selalu lengkap dan mendalam. Selain itu, adanya kendala budaya lokal yang kuat juga mempengaruhi hasil penelitian, di mana sikap dan praktik budaya masyarakat dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan program PKH. Keterbatasan ini mengharuskan peneliti untuk mempertimbangkan bahwa hasil dan rekomendasi dari penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya dapat diterapkan secara umum tanpa penyesuaian konteks lokal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Arah masa depan penelitian ini sebaiknya difokuskan pada pengembangan studi yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di berbagai daerah dengan kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih jauh mekanisme adaptasi program PKH terhadap berbagai kendala lokal, seperti keterbatasan akses informasi dan pengaruh budaya adat. Selain itu, perlu adanya analisis longitudinal untuk menilai dampak jangka panjang dari PKH terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Penelitian di masa depan juga bisa melibatkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang lebih luas, termasuk wawancara mendalam dengan penerima manfaat dan pemangku kepentingan lokal untuk mendapatkan wawasan yang lebih holistik. Evaluasi program yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan sistem feedback dari masyarakat akan membantu mengidentifikasi area perbaikan dan inovasi dalam pelaksanaan PKH.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk terlibat dalam penelitian ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan wawasan selama proses penelitian. Tanpa kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan dan penataan tenaga kerja di masa mendatang. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan. Semoga kita dapat terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Jayapura (2022). Kabupaten Jayapura Dalam Angka. BPS Kabupaten Jayapura.
- BPS Provinsi Papua. (2021). BPS Provinsi Papua. <https://papua.bps.go.id/>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). Aplikasi SIKS - Next Generation - Kementerian Sosial Republik Indonesia. <https://siks.kemensos.go.id/login>
- Lubis, S, A., & Muin, M, I, A. (2019). Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 8 (1), 92-109, 2020
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/keskap/article/view/19141>
- Syarifudin, & Saharudin. (2022). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin dengan Kualitas Program Keluarga Harapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Makassar.
<https://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains/article/view/441>
- Luthfi, M (2019). Efektivitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah. *Comm-Edu (Community Education Journal)* 2 (1), 81-89, 2019
<https://www.mendeley.com/catalogue/87b32645-020b-36fb-b83a-0884edfdcd49/>

- Najiyati, S., Asmana, & Suryadiputra. (2014). Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. www.wetlands.or.id
- Jumroh, & Faisal, K. M. (2019). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Studi tentang Program Keluarga Harapan di Kota Palembang). <https://www.neliti.com/publications/296497>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Sugiyono. (2015). Memahami Penelitian Kualitatif (XI). CV. AIFABETA.
- Suharto, E. (2017). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial. PT Refika Aditama. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1223476>
- Sujarweni, W. V. (2019). Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi. Pustaka Baru Press. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1072785>
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial pasal 33 dan pasal 34
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial* 9 (2), 88-99, 2020 <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas/article/view/2801>
- Maharani, E (2020, Juni 23). Pemkab Jayapura Verifikasi Data Penerima Bansos, *Republika*. Co.id <https://news.republika.co.id/berita/qcct91335/pemkab-jayapura-verifikasi-data-penerima-bansos>